

ANALISIS DAMPAK REGULASI (REGULATORY IMPACT ANALYSIS) DAN PRAKTEK

Dr. Novita Tresiana, M.Si

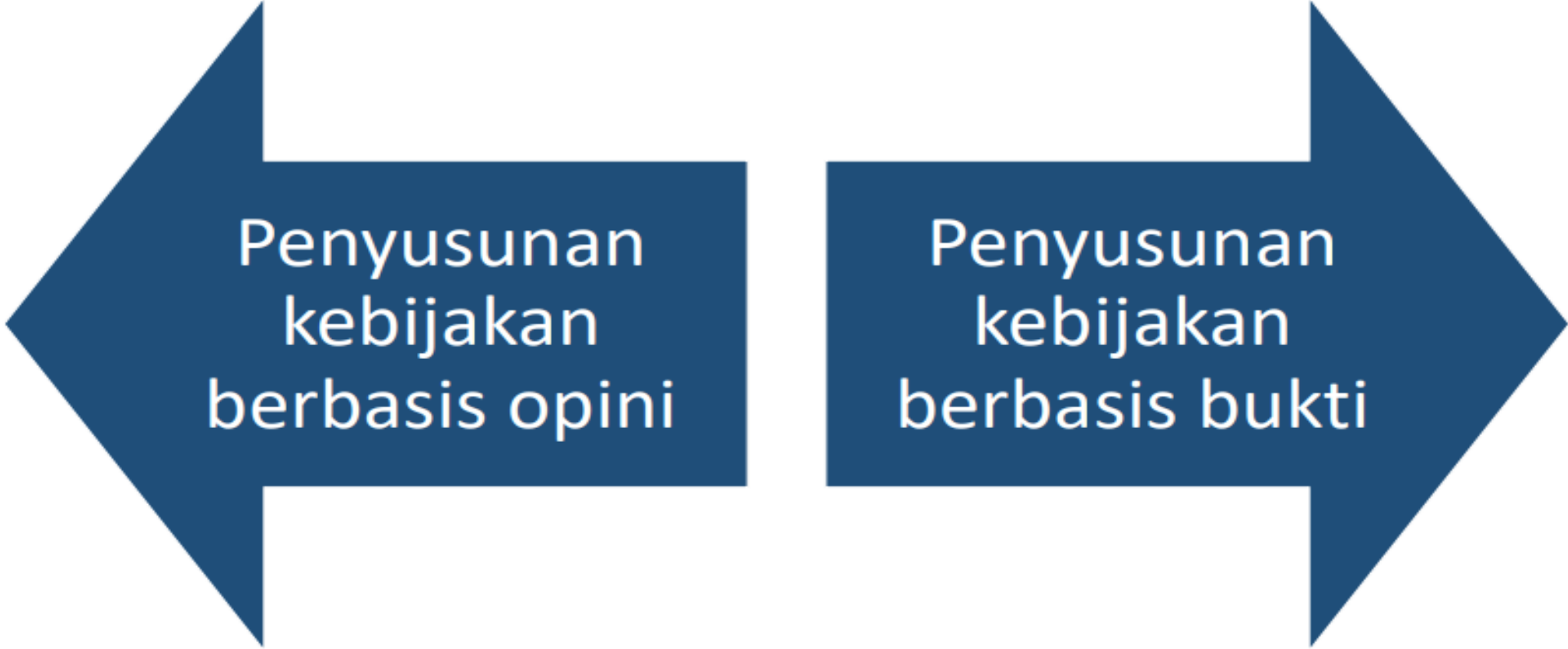
Prinsip Regulasi yang berkualitas adalah:

1. Intervensi pemerintah harus memiliki alasan
2. Kebijakan yang dipilih merupakan alternatif terbaik
3. Memperhitungkan manfaat dan biaya
4. Dilakukan konsultasi publik (stakeholder)
5. Tidak ada beban yang tidak perlu (dampak yang merugikan)

Analisis Dampak Peraturan (*Regulatory Impact Assessment/RIA*)

- ❑ SUATU pendekatan untuk menganalisis sebuah regulasi yang sudah ada atau baru dengan didukung data empiris, dan mengkomunikasikan kepada para pengambil keputusan tentang **dampak, baik dari sisi biaya maupun manfaat dari sebuah regulasi**.
- ❑ Pendekatan RIA banyak digunakan untuk reformasi regulasi guna mendapatkan regulasi yang berkualitas

Paradigma penyusunan kebijakan

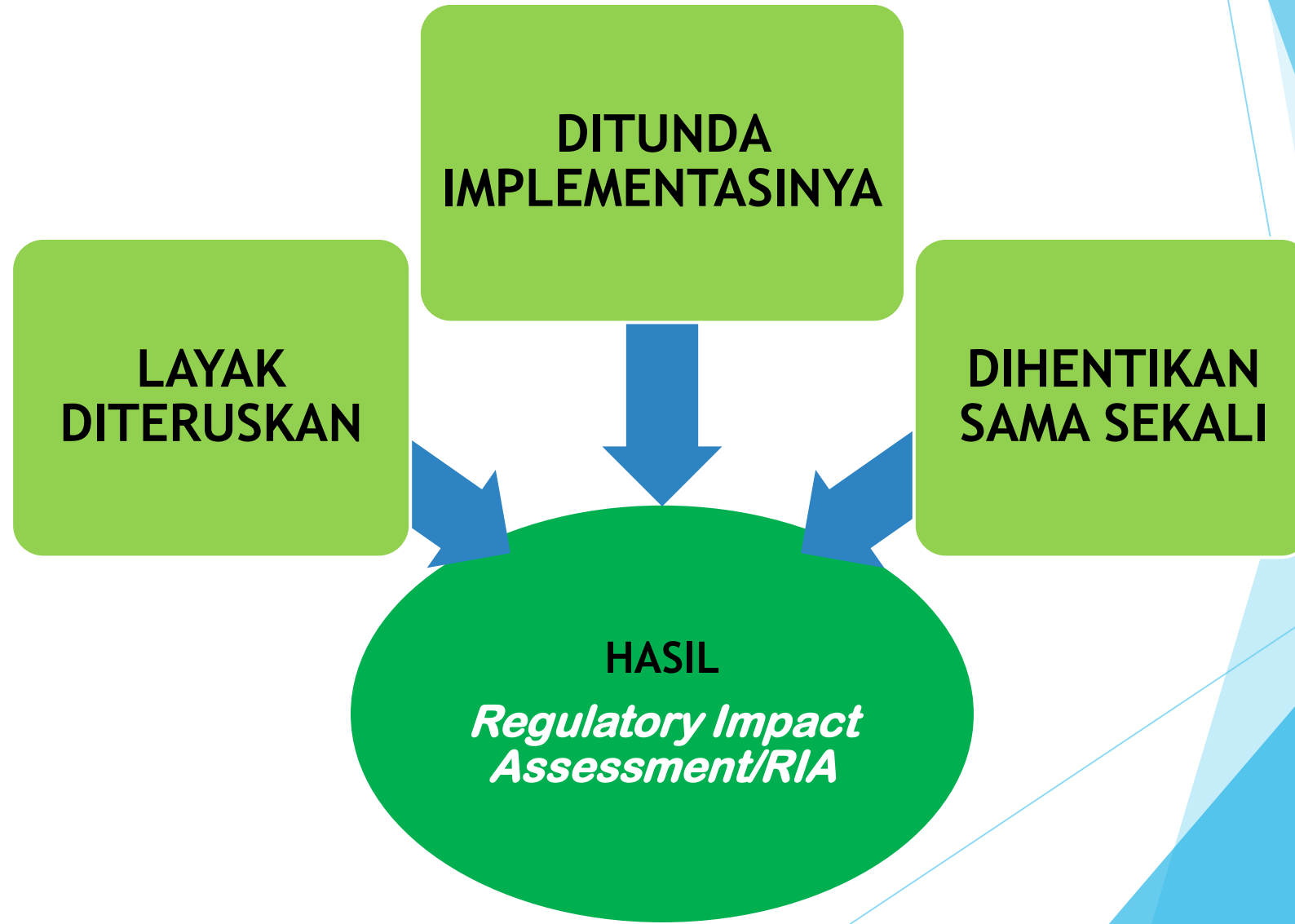


Penyusunan
kebijakan
berbasis opini

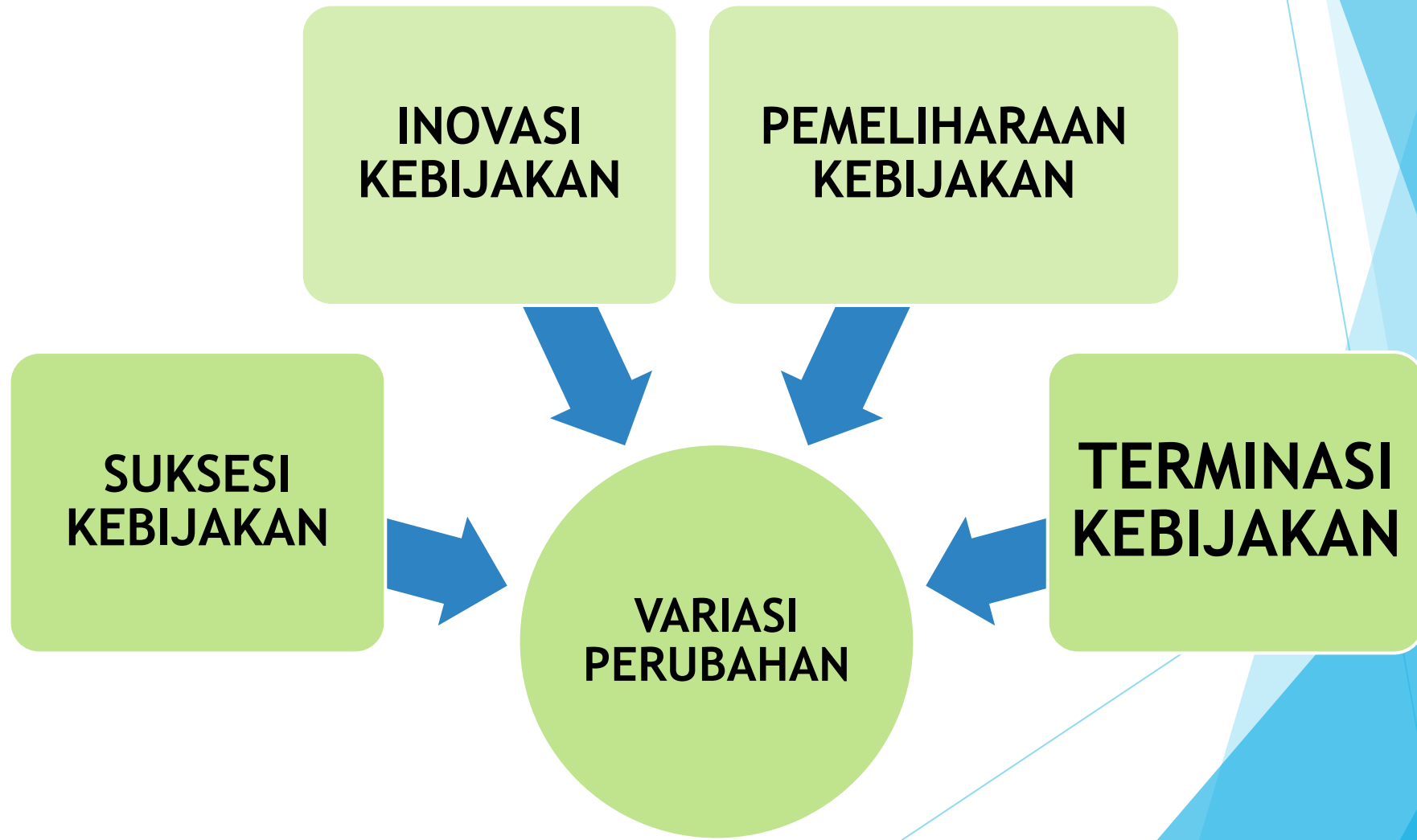
The diagram consists of two large, dark blue arrows pointing in opposite directions, one to the left and one to the right. Each arrow contains white text. The left arrow points towards the left side of the slide, and the right arrow points towards the right side. The background is white with blue geometric shapes in the corners.

Penyusunan
kebijakan
berbasis bukti

Tindakan Sebagai Dampak Regulatory Impact Assessment/RIA



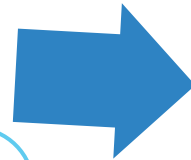
VARIASI PERUBAHAN PASCA RIA (Hoogwood dan Peters dlm Parson, 2006)



SUKSESI

**PENGGANTIAN
KEBIJAKAN YG SUDAH
ADA**

- **LINEAR**
- **KONSOLIDASI**
- **PEMISAHAN**



**KEBIJAKAN
YANG BARU**

SUKSESI adalah

- ▶ Adalah penggantian kebijakan yang sudah ada, dgn kebijakan lain.
- ▶ Perubahan tidak menimbulkan perubahan fundamental dalam pendekatannya, tetapi *melanjutkan kebijakan yg ada*

3 TIPE SUKSESI kebijakan

LINIER

- Penggantian langsung kebijakan/program/organisasi dgn yang lainnya

KONSOLIDASI

- Penyusunan ulang (re-packing) sejumlah kebijakan/program/organisssi menjadi satu kesatuan

SPLITTING (PEMISAHAN)

- Pembongkaran sebuah kebijakan /program/organisasi menjadi sejumlah komponen yang terpisah-pisah

INOVASI KEBIJAKAN

- ▶ Kondisi dimana pemerintah menjadi terlibat langsung dalam problem/arena yang baru dimana sebelumnya tdk ada kebijakan dan anggaran, semua disusun dari awal
- ▶ Tipe Inovasi berupa : hukum/undang-undang, pelayanan, uang, pajak, instrumen ekonomi, persuasi

TIPE INOVASI (PERKEMBANGAN)

KEBUDAYAAN

PERLUASAN PROGRAM

- Penambahan cakupan

PERLUASAN TARGET SASARAN/CLIEN

- Memperluas target sasaran

PENAMBAHAN PROGRAM

- Standar program yang sudah ada
- Pengembangan waktu dan area geografis yg baru

PERLUASAN EKSTERNAL

- Permintaan pihak luar

PEMELIHARAAN KEBIJAKAN

- ▶ **Merupakan adaptasi kebijakan dan penyesuaian kebijakan agar kebijakan tetap berada pada jalurnya**

TERMINASI KEBIJAKAN

- ▶ Disebut sebagai “matinya kebijakan” (*dead policy*)
- ▶ Sebuah kebijakan/program yang akan dihentikan, dikurangi, pengeluaran publik untuk itu dipotong.

TIPE TERMINASI (REDUKSI) KEBIJAKAN

**Penurunan
kebijakan dari
luar**

- Target yang lalu tercapai, turunnya jumlah anak buta huruf

pengurangan

- Staf makin sedikit, jalan berlubang, kualitas sekolah rendah

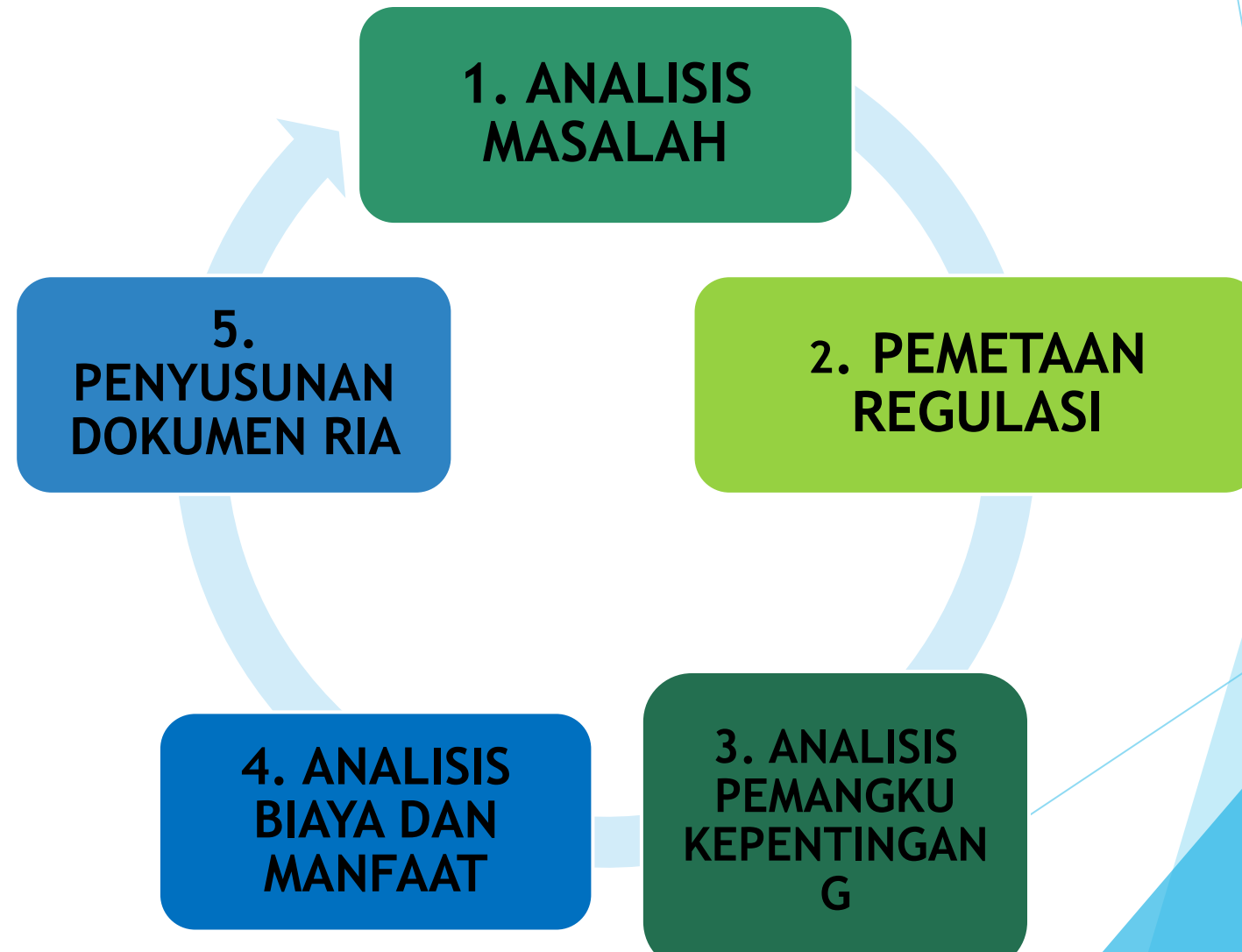
Pencabutan clien

- Klien keluar dari program

Eliminasi program

- Dihancurkan, diganti dengan kebijakan yg baru sama sekali.

LANGKAH-LANGKAH RIA



LANGKAH 1: ANALISIS MASALAH

ANALISIS MASALAH

- Menjawab mengapa masalah terjadi (mengungkap fakta, kesenjangan seharusnya-senyatanya)
- Peluang jawaban lebih dari satu

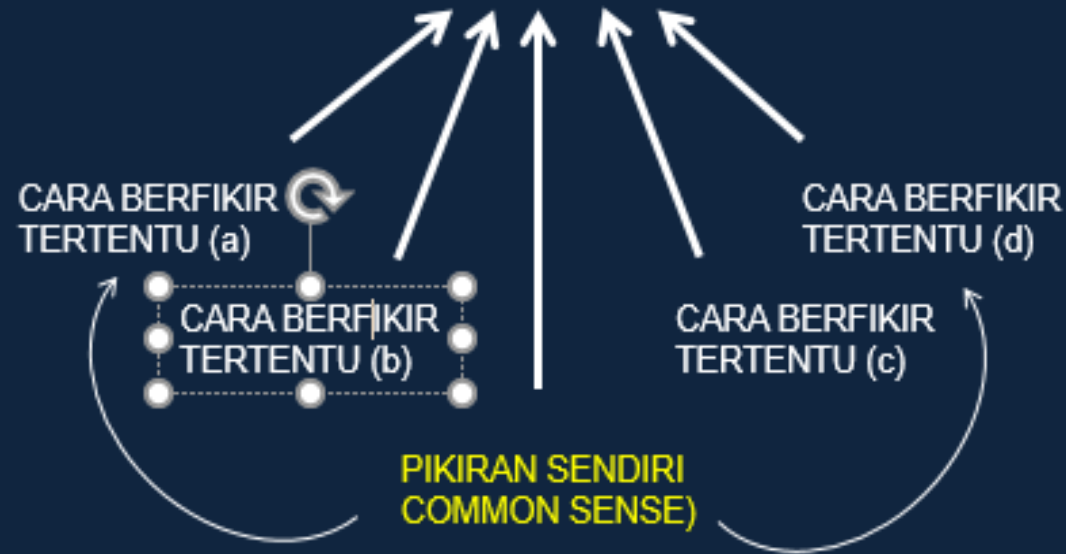
ALAT ANALISIS

- Analisis Pohon Masalah
- Analisis Tulang Ikan

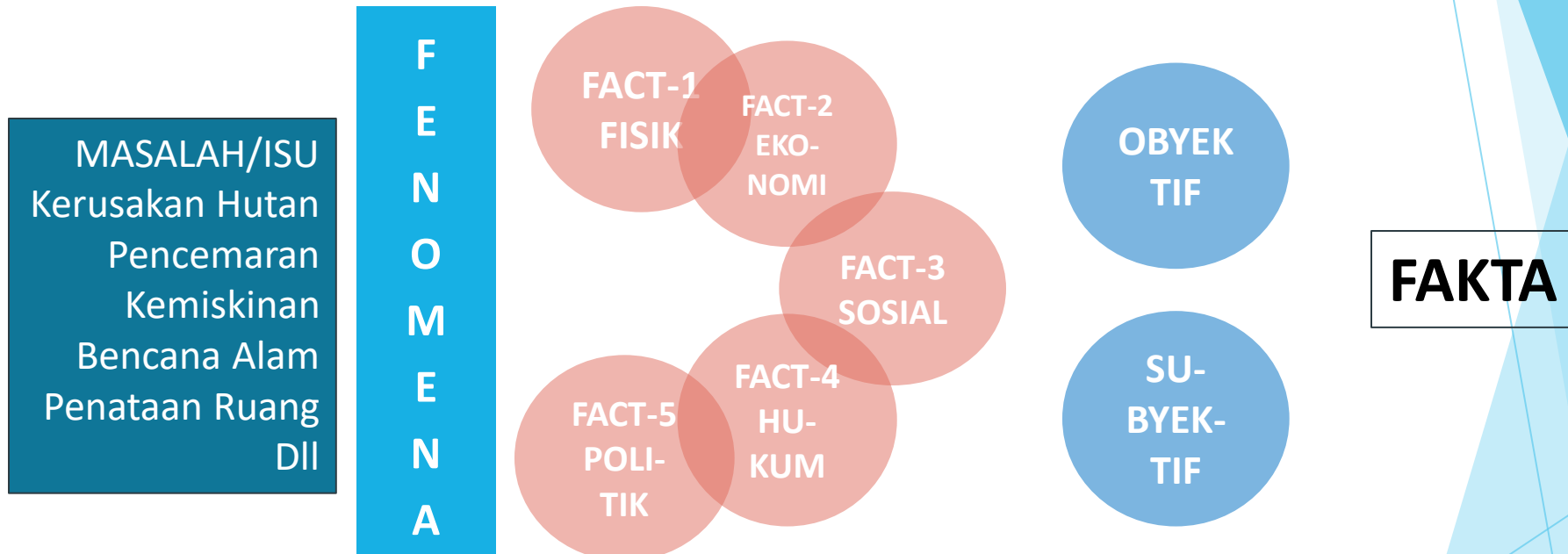
Bagaimana Fakta Diungkap?

KEBIJAKAN = SEGALA UPAYA MENYELESAIKAN MASALAH

F A K T A ~ Masalah & Solusinya



ANALISIS FAKTA



ALAT ANALISIS1: ANALISIS POHON MASALAH

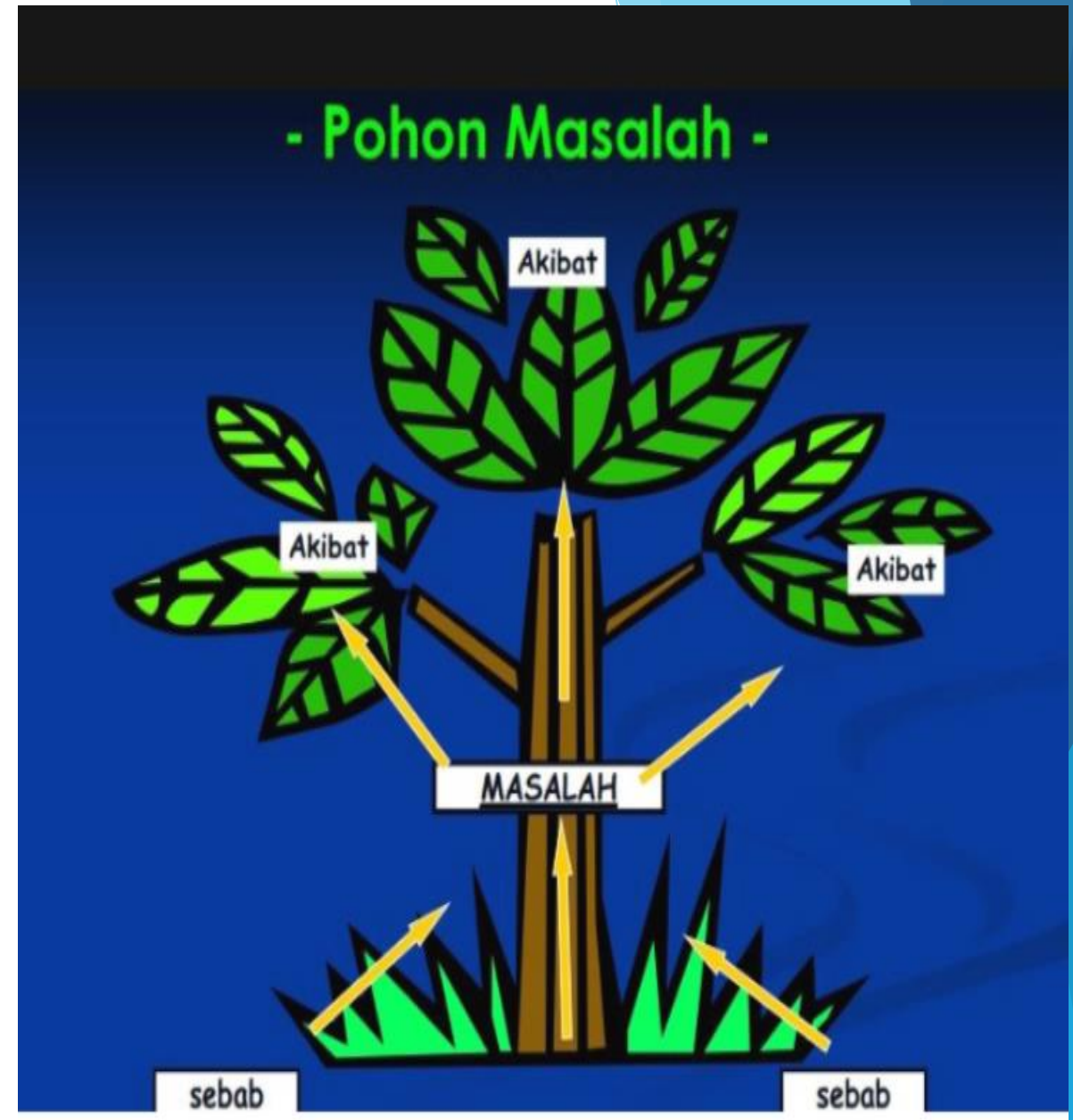
- ❑ Pohon masalah (problem tree) merupakan sebuah pendekatan/ metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah.
- ❑ Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah.

LANJUTAN

Pohon masalah memiliki tiga bagian, yakni

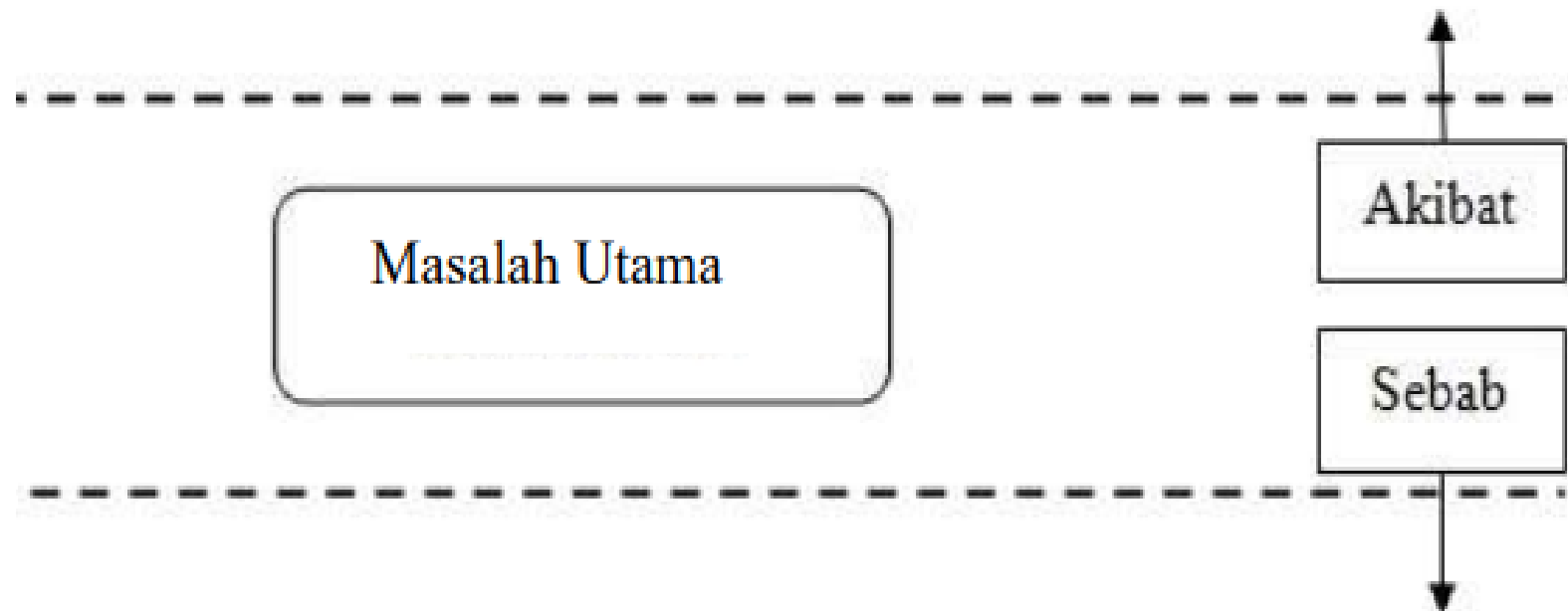
Batang, akar, dan cabang.

1. Batang pohon menggambarkan masalah utama
2. Akar merupakan penyebab masalah inti,
3. cabang pohon mewakili dampak.

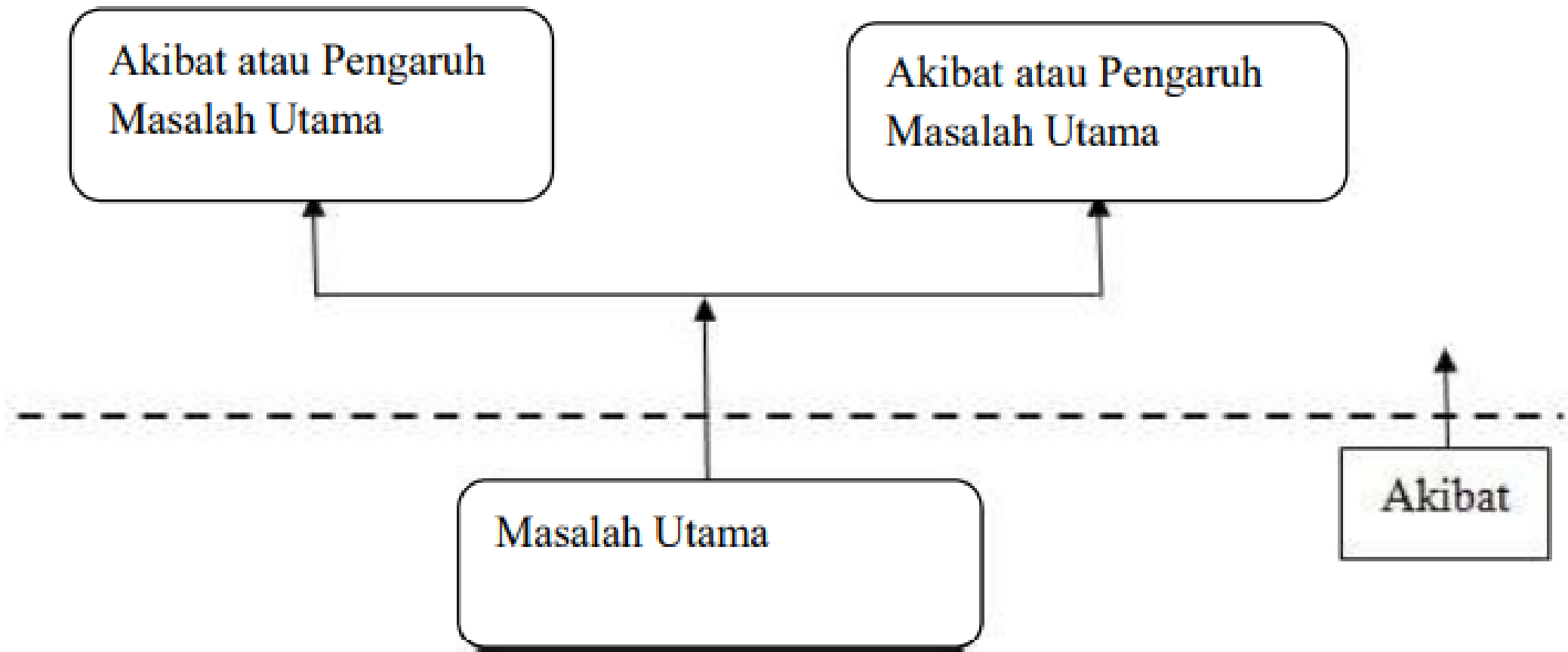


LANGKAH-LANGKAH

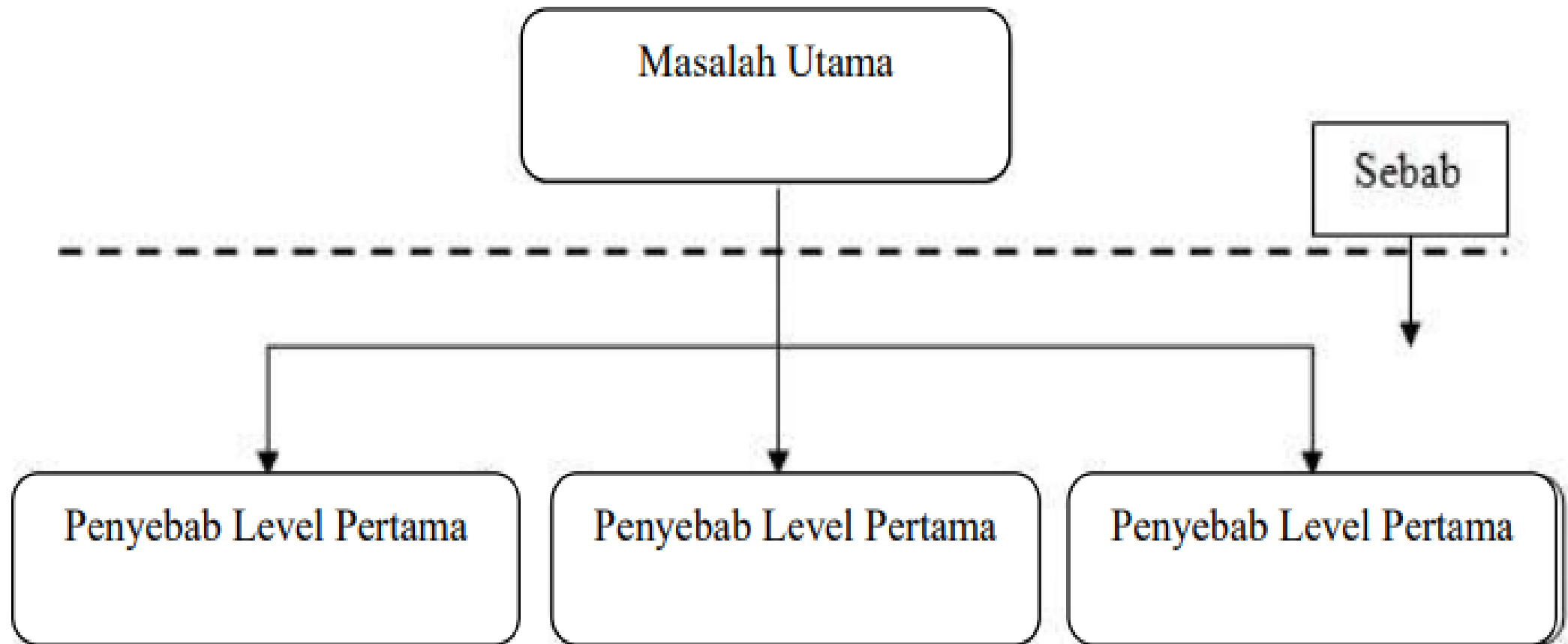
1. **PERUMUSAN MASALAH.** mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama berdasarkan hasil analisis atas informasi yang tersedia



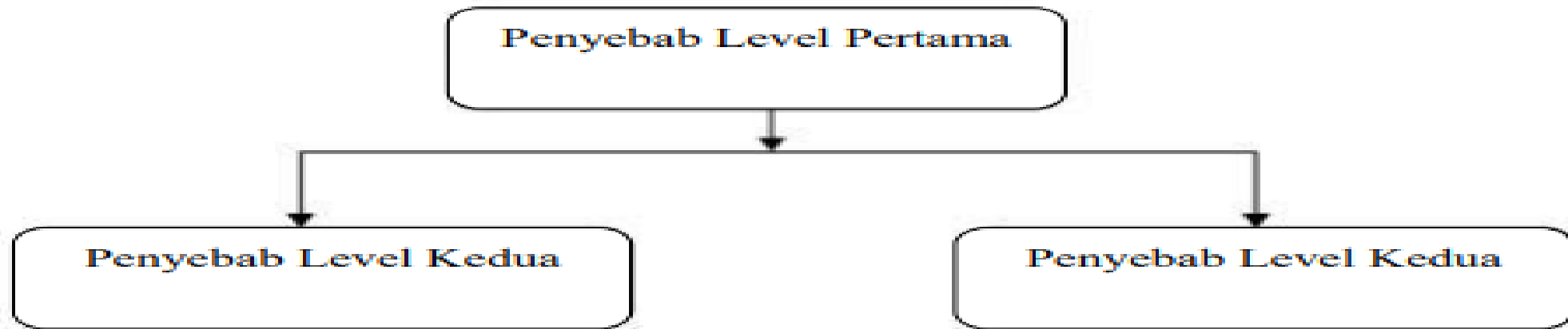
2. **ANALISIS DAMPAK MASALAH**. menganalisis akibat atau pengaruh adanya masalah utama yang telah dirumuskan pada poin 1 di atas



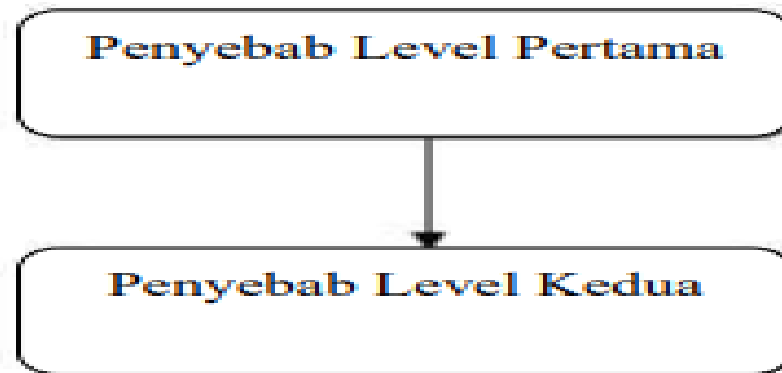
3. **ANALISIS PENYEBAB**. menganalisis penyebab munculnya masalah utama. Penyebab pada tahap ini kita namakan penyebab level pertama



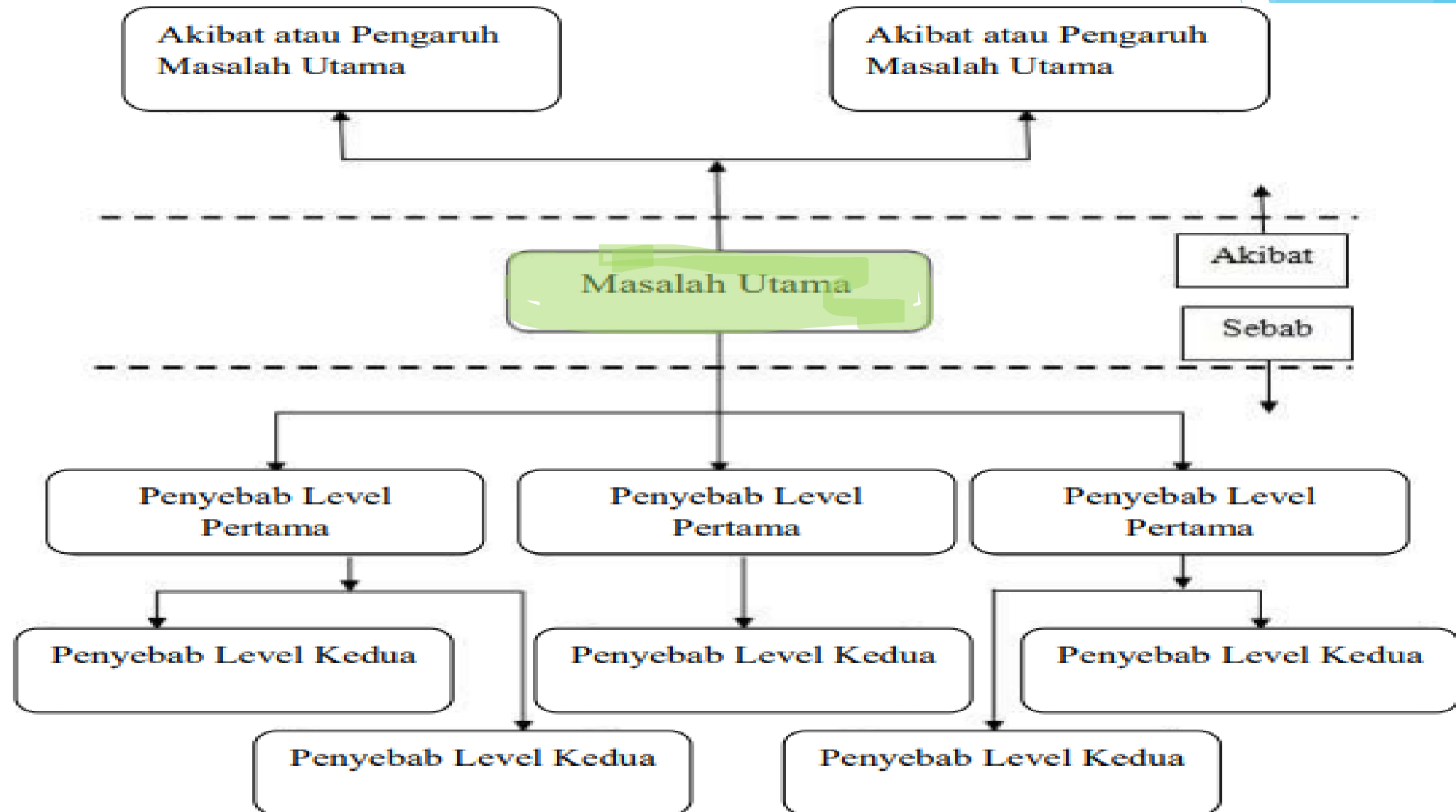
4. **ANALISIS PENYEBAB KEDUA**. menganalisis lebih lanjut penyebab dari penyebab level pertama. Penyebab dari munculnya penyebab level pertama ini kita namakan penyebab level kedua



Gambar 2.7. Analisis penyebab pertama



5. Menyusun pohon masalah secara keseluruhan.



Pohon masalah: Kualitas Pendidikan

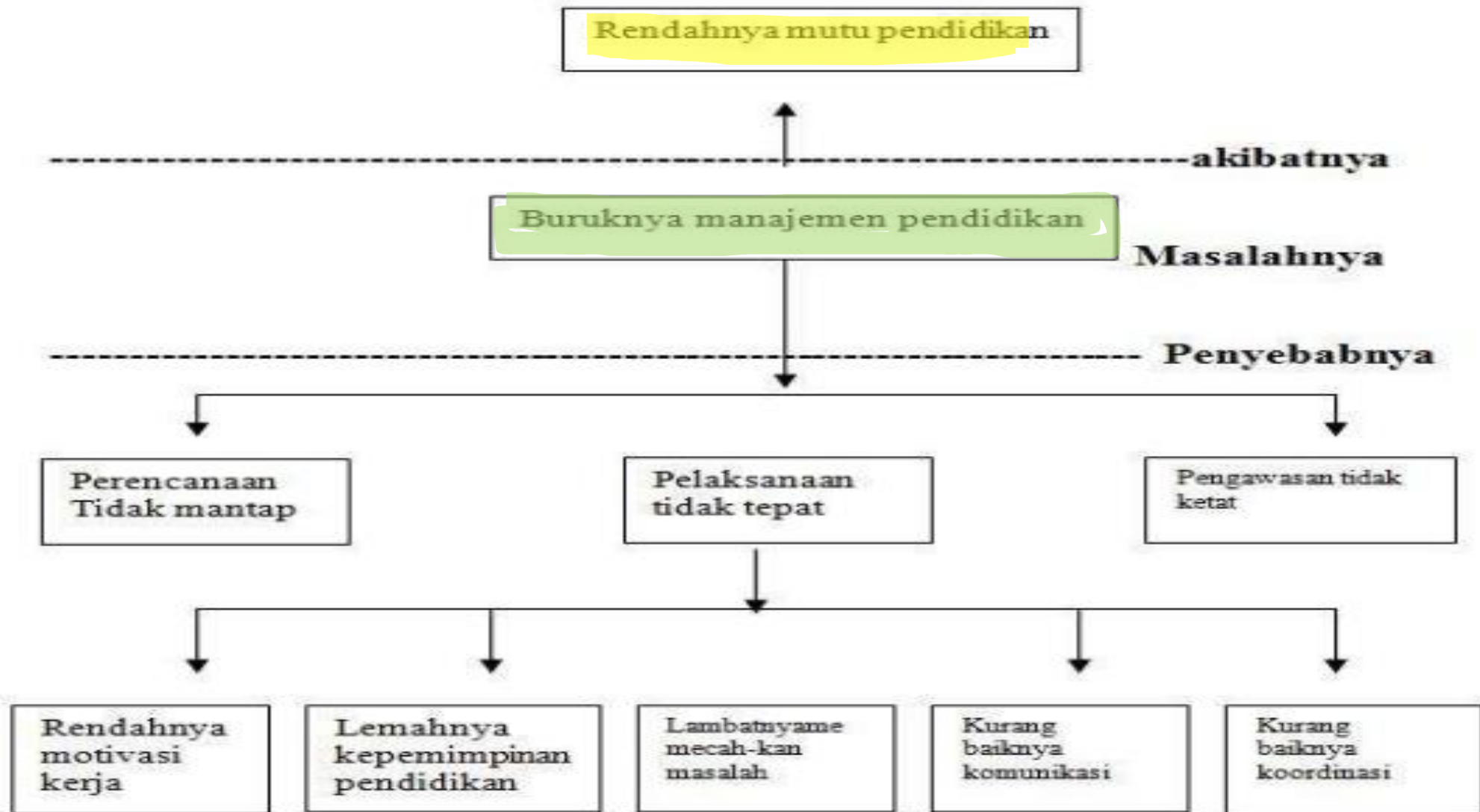
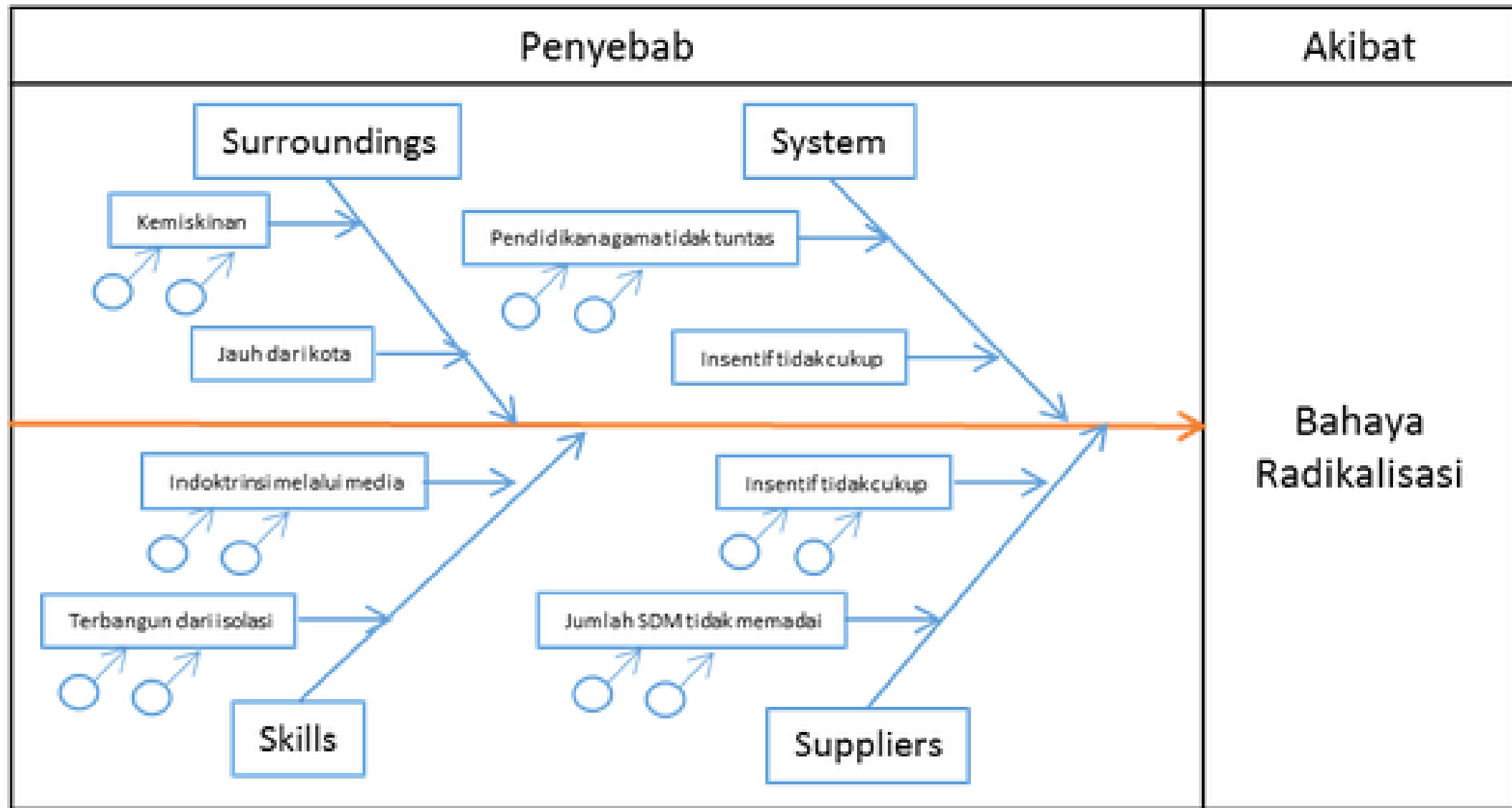


Diagram pohon :
Masalah rendahnya kesehatan



MASALAH GIZI





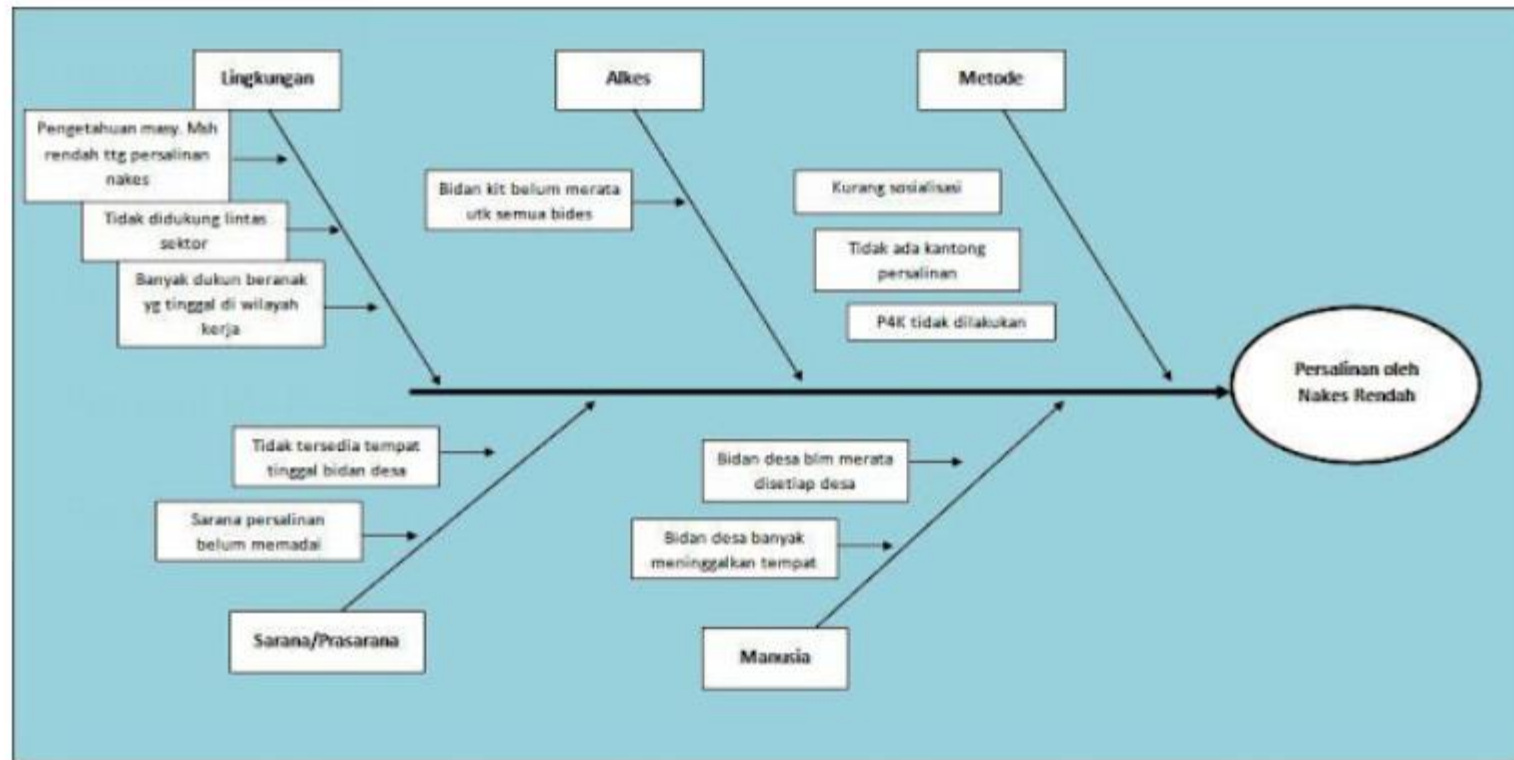
ANALISIS TULANG IKAN

- ❑ Menganalisis apa yang terjadi dalam proses, yaitu dengan cara memecah proses menjadi sejumlah kategori yang berkaitan dengan proses , mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan

LANGKAH-LANGKAH

- ❑ Mengidentifikasi sebab akibat
- ❑ Mengidentifikasi Berbagai Kategori
- ❑ Menemukan sebab-sebab potensial dan cara sumbang saran
- ❑ Mengkaji setiap kategori sebab utama
- ❑ Mencapai kesepakatan sebab-sebab yang paling mungkin

ANALISIS TULANG IKAN: *Penyebab- penyebab sehingga terjadi rendahnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan*



LANGKAH 2: PEMETAAN REGULASI

OPERASIONALISASI LANGKAH-LANGKAH PEMETAAN REGULASI:

1. Identifikasi Berbagai Kebijakan yang terkait dengan peraturan yang hendak dibuat/dinilai, baik vertical/horizontal/Nasional-Lokal
2. Lakukan analisis satu demi satu dari setiap peraturan dengan memahami apa yang di atur, apa yang dikecualikan
3. Melakukan Analisis apa implikasi dari peraturan tersebut kepada peraturan yang hendak dibuat

UU NO.27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Judul	Penataan Ruang (UU 26/2007)
Fokus	Penataan ruang tingkat nasional
Tindakan yang Diharuskan	1. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan 2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia 3. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang
Tujuan	1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan tata ruang 2. Pelaksanaan penataan ruang nasional 3. Koordinasi, penyelenggaraan, penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
Pengecualian	Pengecualian diberikan terhadap instansi pelaksana yang telah berjalan sebelum peraturan ini ditetapkan.
Masa Berlaku	Berlaku hingga dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengubah atau mencabutnya.
Tanggungjawab	- Pemerintah pusat: 1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang 2. Pelaksanaan penataan tata ruang secara nasional 3. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan - Pemerintah daerah: 1. Penetapan kawasan strategis provinsi 2. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi 3. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi 4. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi - Masyarakat: 1. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang 2. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang 3. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

LANGKAH 3 : ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN

- ❑ Dilakukan untuk memahami lingkup kelembagaan serta para actor yang terkait dengan pemegang kunci kebijakan, yang menentukan jalannya kebijakan mulai formulasi sampai tingkat implementasi
- ❑ Analisis memetakan berbagai actor dan kepentingannya dalam sebuah isu kebijakan public
- ❑ Analisis stakeholders menelaah interest dari pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan kebijakan dan memahami mana pemangku kepentingan akan berpengaruh, analisis ini berguna dalam memprioritaskan interaksi dengan kelompok kepentingan utama, terutama yang berdampak langsung

POWER (KEKUATAN) AND INTEREST (KEPENTINGAN)

POWER : bisa berasal dari potensi stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan atau organisasi yang berasal dari kekuasaan berbasis kedudukan atau sumber daya mereka dalam organisasi, atau mungkin pengaruh mereka yang berasal dari kredibilitas mereka sebagai pemimpin atau ahli.

INTEREST : seorang stakeholder terhadap sebuah kebijakan atau proyek tertentu akan diukur melalui tingkat keaktifannya

INTERVENSI: Setelah dilakukan pemetaan power serta interest dari tiap stakeholder, hal yang penting untuk dilakukan adalah dalam menentukan intervensi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap stakeholder yang sudah berhasil dipetakan.

Power Grid (Pemetaan Kepentingan)

		Kepentingan	
		Besar	Kecil
Kekuatan	Besar	A Stakeholder kunci	B Tetap jaga kepuasannya
	Kecil	C Tetap berikan informasi	D Upaya minimal

LANGKAH 1. STAKEHOLDERS MAPPING

STAKEHOLDERS	INTEREST	RESOURCES
BIROKRASI	•PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN •PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA	•OTORITAS •LEGITIMASI •REGULASI
ANGGOTA LEGISLATIF	•LEGISLASI •BUDGETTING •PENGAWASAN •MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH	•PERAN DAN KEWENANGAN •KEKUATAN POLITIK •LEGITIMASI
PENGUSAHA	•INVESTASI •KEMUDAHAN FASILITAS •ANTISIPASI TERHADAP KEBIJAKAN	•PERUSAHAAN •MODAL •TENAGA KERJA
ORGANISASI LSM	•PERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT •KONTROL SOSIAL TRHD MASALAH •MENGANGKAT ISU SOSIAL DAN LINGKUNGAN	•ORGANISASI •KONTROL SOSIAL
TOKOH MASYARAKAT	•SEBAGAI PENYAMPAI ASPIRASI MASYARAKAT	•PENGARUH DI MASYARAKAT •DIPERCAYA
PERGURUAN TINGGI	•PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	•LEMBAGA PENELITIAN/PENDIDIKAN

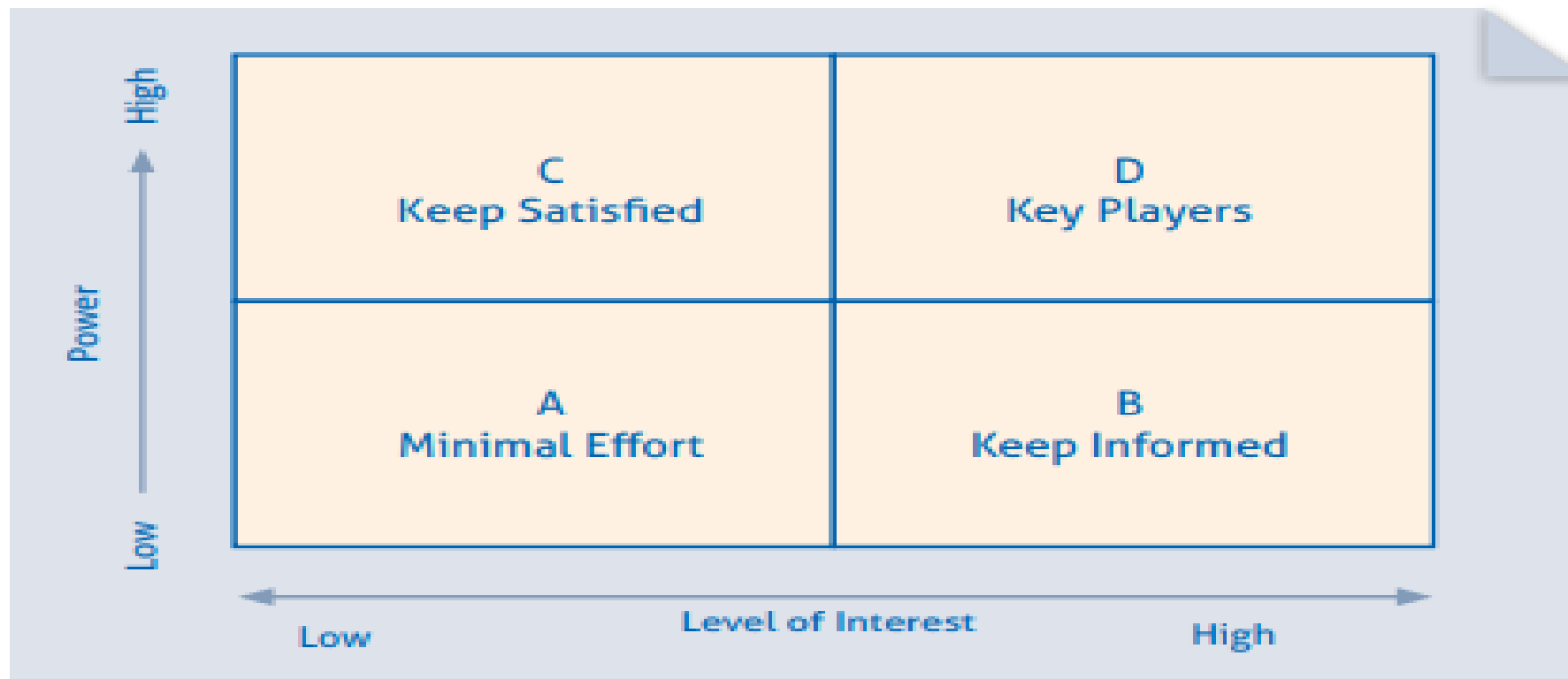
LANGKAH 2: MASUKKAN DALAM POWER GRID

Tabel 1. Matriks Empat Kelompok Besar *Stakeholders*

	Pengaruh Besar	Pengaruh Kecil
Kepentingan Besar	Pemerintah: Kepentingan politik “kelompok <i>stakeholders</i> yang paling kritis”	Swasta: a. Mau berinvestasi b. Memberi pinjaman “kelompok <i>stakeholders</i> penting namun yang perlu pemberdayaan”
Kepentingan Kecil	Pemerintah: a. Perizinan b. Pembebasan lahan “kelompok yang bermanfaat untuk merumuskan atau menjembatani keputusan dan opini”	Masyarakat: Kemauan untuk di Relokasi “kelompok <i>stakeholders</i> paling rendah prioritasnya” yang

LANGKAH 3 : REKOMENDASI

Gambar 3.5. Jenis aktor dalam setiap kuadran



Sumber: Mintzberg, 1999

PILIHAN/REKOMENDASI

STAKEHOLDERS SEKTOR A:

tidak memiliki interest yang tinggi dalam keputusan organisasi juga power yang rendah untuk mempengaruhi dan memberikan dampak yang besar. Namun demikian, organisasi tetap harus menjaga kelompok ini mendapatkan informasi dalam batas yang diperlukan, tetapi tidak harus berinvestasi terlalu banyak ke mereka.

STAKEHOLDERS SEKTOR B:

memiliki interest yang tinggi dalam merespon semua keputusan organisasi meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki power yang besar untuk mempengaruhi. Stakeholder ini bisa dijadikan sebagai sekutu dalam mendukung kebijakan tertentu. Oleh karenanya penting untuk menginformasikan isu-isu yang mereka minati.

STAKEHOLDERS SEKTOR C:

biasanya adalah investor atau legislatif. Mereka berperilaku pasif dan menunjukkan rendahnya interest dalam urusan perusahaan. Menghadapi tipe stakeholder seperti ini perlu untuk menganalisis potensi minat dan reaksi kelompok-kelompok ini dalam semua perkembangan penting dalam organisasi, dan melibatkan mereka sesuai dengan kepentingan mereka.

STAKEHOLDERS SEKTOR D:

Stakeholder yang terpenting dan berapa pada sektor D sebagai key player harus dilibatkan dalam semua perkembangan organisasi

LANGKAH 4: ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT (ABM)

- ❑ metode untuk melihat suatu program atau kebijakan dengan membandingkan perubahan manfaat sosial untuk masyarakat dengan biaya sosialnya
- ❑ Perumus kebijakan perlu melakukan ABM untuk regulasi yang akan dibahas
- ❑ ABM dengan perhitungan kasar lebih baik dibandingkan tanpa ABM. Mengapa? (Treasury of NZ, 2015)
 1. ABM mengorganisasi informasi secara logis dan metodis
 2. ABM mengurangi ketidakpastian dalam estimasi manfaat dan biaya
 3. ABM mengurangi kecenderungan perumusan kebijakan menggunakan intuisi atau ideologi

Biaya dari suatu kebijakan

biaya sumberdaya untuk kepatuhan program

- biaya untuk penerapan suatu program yang ditanggung sektor rumah tangga dan perusahaan

biaya penerapan kebijakan oleh pemerintah

- biaya monitoring, administratif, dan penegakan hukum
- tidak termasuk pembayaran transfer (*double counting*)

hilangnya kesejahteraan sosial

- dalam teori ekonomi adalah turunnya surplus konsumen dan produsen

biaya transisi

- nilai sumberdaya yang tidak digunakan karena kebijakan dan biaya realokasi sumberdaya

biaya tidak langsung

- produktivitas, inovasi, penurunan investasi

Sumber: [Anna Alberini \(n.d.\)](#)

Manfaat dan Biaya Sosial

- Manfaat sosial antara lain:
 - pertumbuhan ekonomi
 - penciptaan lapangan kerja
 - peningkatan produktifitas tenaga kerja
 - peningkatan penerimaan pajak
 - peningkatan penyediaan barang publik

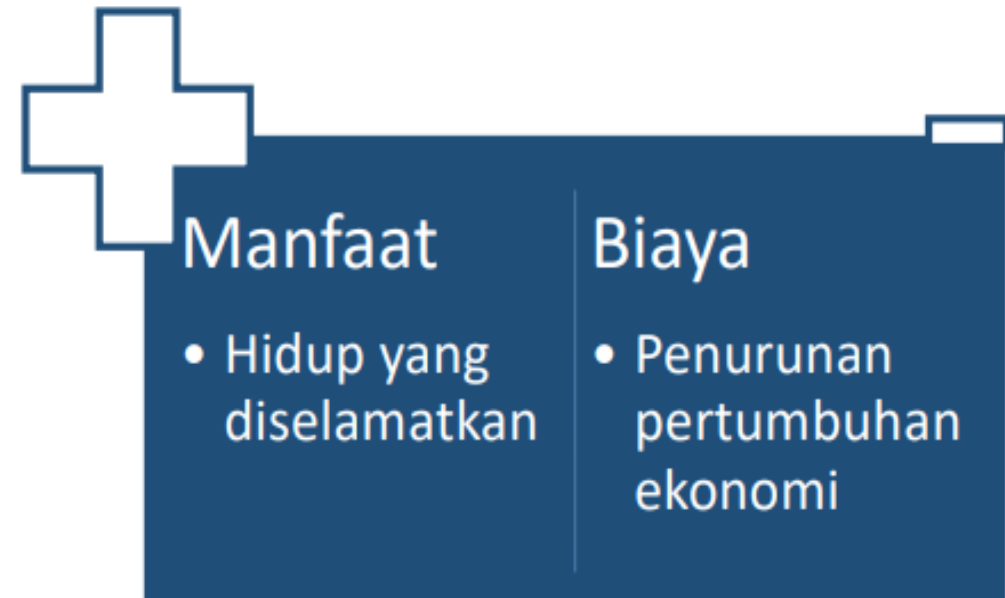
- Biaya sosial antara lain:
 - eksternalitas negatif seperti polusi
 - kerusakan lingkungan
 - pengangguran
 - penggunaan barang publik
 - ketimpangan pendapatan

Studi Kasus: Analisis ABM regulasi label gambar peringatan merokok (Chaloupka dkk., 2014)

- Manfaat Sosial
 - Peningkatan produktivitas karena kesehatan membaik
 - Berkurangnya eksposur rokok terhadap perokok pasif
 - Berkurangnya ibu yang merokok saat hamil
 - Penurunan biaya sistem kesehatan akibat merokok
- Biaya Sosial
 - Biaya penerapan label gambar peringatan
 - Biaya administrasi dan penegakan regulasi
 - turunnya surplus konsumen?
- Manfaat penerapan regulasi *lebih besar* dari biaya sosial

Studi Kasus: ABM dari *social distancing* untuk mencegah penyebaran Covid-19

- Penerapan kebijakan *social distancing* memberikan manfaat netto yang positif (Greenstone dan Nigam, 2020; Thunstorm dkk., 2020)
- Correija, Luck, dan Verner (2020) menemukan bahwa intervensi kesehatan masyarakat yang lebih awal dan lebih lama berasosiasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pasca pandemi flu Spanyol



LANGKAH-LANGKAH

1. SIAPA YANG TERKENA DAMPAK DAN PENGARUH DARI ISU STRATEGIS

- ❑ Pada langkah pertama ini pembuat kebijakan mengidentifikasi seluruh pihak yang terkait dengan isu strategis, baik yang terkena dampak (positif dan negatif), maupun yang terkena pengaruh (nilai, prinsip)
- ❑ Setidaknya ada empat pihak yang terkait: pemerintah, sektor privat/swasta/bisnis, organisasi-organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok dan golongan-golongan di dalam masyarakat (pemuda, perempuan, anak, orang tua, suku, dan lain sebagainya)

2. Identifikasi biaya dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak terkait

- ❑ Pada langkah kedua ini pembuat kebijakan menyusun daftar manfaat dan biaya yang akan diterima oleh para pihak terkait. Manfaat itu bisa ekonomi, sosial, budaya atau politik. Dalam hal mengidentifikasi biaya-biaya dan manfaat yang akan dibebankan pada pihak terkait, pembuat kebijakan harus menimbang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kadang sulit dikuantifikasi seperti good governance, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya.
- ❑ Dalam konteks pembentukan regulasi pembuat kebijakan juga harus menimbang biaya dan manfaat yang akan muncul dalam implementasi (Pelaksanaan peraturan dan penyelesaian sengketa) di antaranya:
 1. apakah diperlukan proses administrasi tambahan?
 2. apakah dibutuhkan organisasi/unit pelaksana baru?
 3. apakah ada keperluan penambahan sarana dan teknologi baru?
 4. apakah ada kebutuhan penambahan jumlah SDM atau peningkatan kualitas SDM?
 5. apakah perlu lembaga penyelesaian sengketa khusus?
 6. apakah perlu mekanisme monitoring dan evaluasi tersendiri?

3. Kuantifikasi atas dampak kebijakan

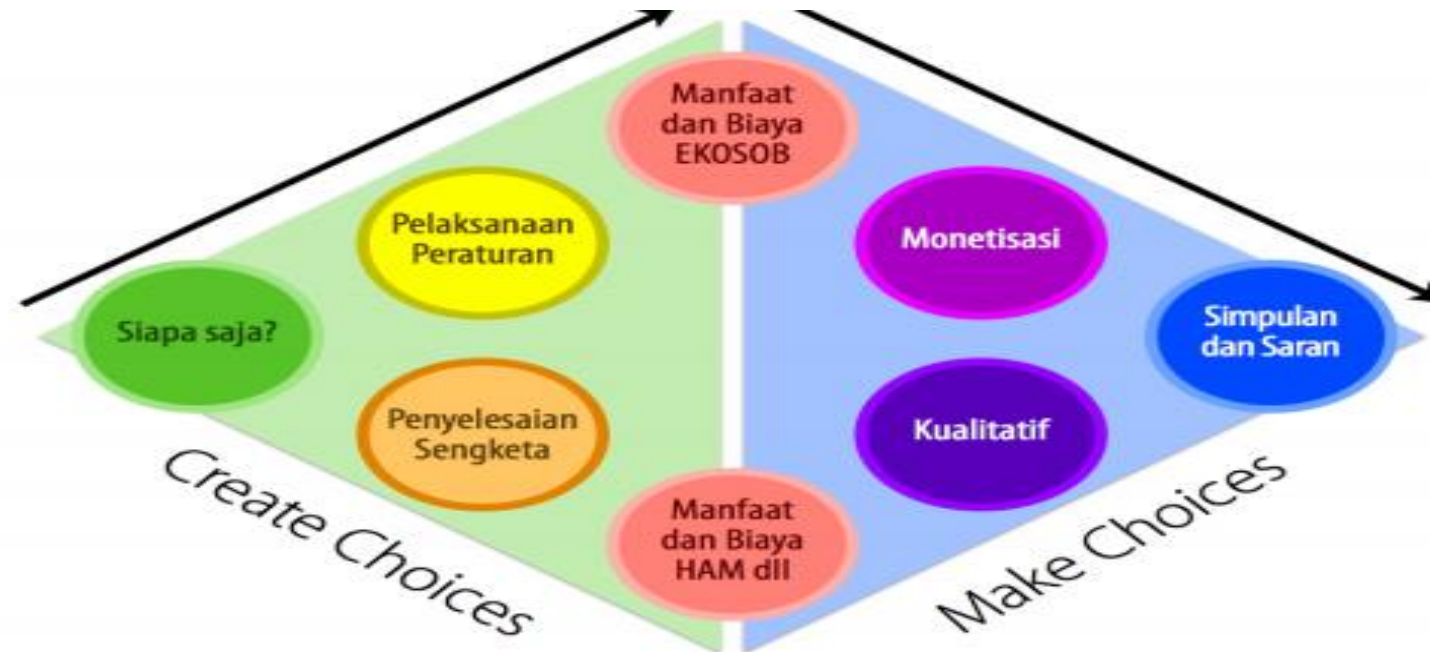
- Pada langkah ketiga ini pembuat kebijakan diminta untuk melakukan kuantifikasi atas tiap dampak dari kebijakan. Tidak seluruh dampak mudah dikuantifikasi, namun dianjurkan untuk memonetasinya seoptimal mungkin

4. Valuasi terbatas

Pada langkah ini pembuat kebijakan bisa menggunakan teknik tersendiri yang diperkenalkan untuk melakukan kuantifikasi dan valuasi. Pada tahapan awal, biasanya ditentukan impact yang akan diperoleh dari sebuah aturan dapat diukur dan dikuantifikasi atau tidak. Apabila bisa, biasanya digunakan “market price” untuk menilainya. Apabila tidak bisa, salah satu tekniknya adalah menentukan “willingness to pay” dalam konteks keuntungan atau “willingness to accept” dalam konteks biaya

5. Kuantifikasi Sepenuhnya

Pada langkah kelima semua manfaat dan biaya sudah terhitung sepenuhnya dalam satuan mata uang. Jadi, pada tahapan itu, pembuat kebijakan telah dapat menentukan pilihan yang paling baik dari kebijakan yang akan diambil.



LANGKAH 5: MENYUSUN LAPORAN RIA

1. PENDAHULUAN :

- ❑ Pentingnya topik/masalah yang dianalisis
- ❑ Penjelasan krusialnya masalah kepada stakeholders (pembaca) untuk dianalisis dan ditindaklanjuti didukung dengan data riil untuk meyakinkan akan pentingnya topik/masalah

2. ANALISIS MASALAH

- ❑ Menguraikan apa masalah intinya, apa penyebab, apa akibatnya
- ❑ Penyajian dilengkapi dengan diagram untuk mempermudah pembaca memahami analisis masalah yang dibuat

3. PEMETAAN REGULASI

- ❑ Berisi regulasi yang terkait dengan topik yang dianalisis
- ❑ Berisi keterkaitan berbagai regulasi (hulu-hilir/nasional-daerah) dengan topik yang dibahas (berapa banyak regulasi tidak masalah, terpenting pantas dan memiliki keterkaitan topik yang dibahas)

4. ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN

- ❑ Berisi siapa saja yang akan terkena dampak dari kebijakan yang nantinya/telah diambil
- ❑ Melihat besar pengaruh, kepentingan stakeholders terhadap kebijakan sehingga dapat ditentukan tinggi- rendah/penting-tidak penting stakeholders

5. PEMILIHAN ALTERNATIF

- ❑ Alternatif kebijakan yang diambil dan harus diambil untuk mengatasi masalah
- ❑ Pemilihan kebijakan mana yang paling mungkin dijalankan

6. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

- ❑ Alat analisis untuk menilai kelayakan kebijakan yang dipilih
- ❑ Ketika kebijakan yang dipilih apakah kebijakan itu layak atau tidak layak

7. REFERENSI-REFERENSI